

Analisis pertumbuhan ekonomi, ketimpangan wilayah dan tingkat kemiskinan

Abdul Rajab^{1*}, Jamaludin Kamarudin²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah, Mamuju.

*Email: rajab.daeng@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi, ketimpangan wilayah dan tingkat kemiskinan yang ada pasca pemekaran wilayah. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Mamuju. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Analisis yang akan digunakan yaitu Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Analisis ketimpangan wilayah, dan analisis tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil olah data yang ada maka pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan bahwa tahun 2005-2020 mengalami fluktuatif atau naik turun hal ini terlihat dari hasil olah data dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi diperoleh pada tahun 2010 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 11,91% sedangkan tingkat terendah berada pada tahun 2020 yakni -2,42. Dari hasil yang diperoleh dimana pada tahun 2005-2012 ketimpangan wilayah nilai indeks nya masih berada dibawah 0,35 dimana masih berada pada kategori Ringan, tahun 2013-2018 didapatkan nilai indeks antara 0,35 sampai dengan 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan yang masih Sedang, sedangkan pada tahun 2019-2020 diperoleh nilai indeks yang dibawah 0,35 sehingga ketimpangan ini turun lagi menjadi status Ringan. Secara umum tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2005-2020 cukup tinggi dimana persentase terendah berada pada tahun 2016 dengan tingkat kemiskinan mencapai 11,3% dan tingkat tertinggi berada pada tahun 2020 karena mencapai tingkat kemiskinan sebesar 20,74%.

Kata Kunci: Pertumbuhan ekonomi; ketimpangan; kemiskinan

Analysis of economic growth, regional inequality and poverty levels

Abstract

This study aims to analyze how the level of economic growth, regional inequality and poverty levels that exist after the division of the region. This research will be conducted in Mamuju Regency. Sources of data in this study consisted of primary data and secondary data. The analysis that will be used is the Analysis of Economic Growth, the analysis of regional inequality, and the analysis of the poverty level. Based on the results of existing data processing, economic growth can be explained that in 2005-2020 experienced fluctuations or ups and downs, this can be seen from the results of data processing where the highest economic growth was obtained in 2010 with an economic growth rate of 11.91% while the lowest level was at 2020 is -2.42. From the results obtained where in 2005-2012 regional inequality the index value was still below 0.35 which was still in the Mild category, in 2013-2018 the index value between 0.35 and 0.5 was included in the category of moderate inequality. , while in 2019-2020 the index value was below 0.35 so that this inequality fell again to a Mild status. In general, the poverty rate in West Sulawesi Province from 2005-2020 is quite high where the lowest percentage was in 2016 with a poverty rate of 11.3% and the highest level was in 2020 because it reached a poverty rate of 20.74%. Keywords: one or more word(s) or phrase(s); that it's important; spesific, or representative for the article.

Keywords: Economic growth; inequality; poverty

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya tujuan dari perencanaan pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang baik dan distribusi pendapatan yang merata untuk setiap wilayah yang ada tanpa adanya perbedaan. Ada beberapa faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi diantaranya pertumbuhan ekonomi, rendahnya ketimpangan wilayah dan rendahnya kemiskinan.

Indonesia yang merupakan suatu negara kepulauan dan memiliki perbedaan karakteristik wilayah merupakan konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari bagi pemerintah untuk menciptakan pemerataan ekonomi. Karena karakteristik wilayah mempunyai pengaruh kuat pada terciptanya pola pembangunan ekonomi, sehingga suatu keniscayaan bila pola pembangunan ekonomi di Indonesia tidak seragam. Ketidakteraturan ini berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh, yang pada gilirannya mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh lambat. Kemampuan tumbuh yang berbeda ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan baik pembangunan maupun hasilnya, yakni pendapatan antar daerah (Sianturi, 2011).

Pada dasarnya, pembangunan memiliki sifat multidimensi yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya (Arsyad, 2014). Menurut Todaro (2015), kondisi pembangunan pada sejumlah negara memiliki beberapa permasalahan, salah satunya yaitu ketimpangan. Masalah ketimpangan pembangunan mulai terkenal sejak tahun 1965 ketika seorang ekonom bernama Jeffrey Gale Williamson yang meneliti proses ketimpangan pembangunan (Sjafrizal, 2012). Pada awal pembangunan di suatu daerah, maka terdapat permasalahan dalam pemerataan pendapatan. Pada daerah maju akan menunjukkan perkembangan yang pesat sehingga meninggalkan daerah terbelakang. Indikator lain penentu pembangunan suatu daerah yaitu adalah faktor penduduk. Menurut Sjafrizal (2012), salah satu penyebab ketimpangan pembangunan yaitu kondisi demografis pada setiap daerah. Menurut Lessmann (2012) penanggulangan ketimpangan dapat dilakukan dengan menginvestigasi faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Hal tersebut dilakukan untuk menganalisis aspek-aspek yang perlu diperbaiki secara teori dan empiris.

Salah satu provinsi yang tergolong masih muda di Indonesia adalah Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan wilayah pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan yakni pada tahun 2004 sekaligus menjadi provinsi ke-33 di Indonesia. Dengan keluarnya undang-undang yang mengatur tentang sistem otonomi daerah maka menjadi dasar untuk menjadi wilayah administrasi yang mandiri, tentu saja pemekaran wilayah merupakan kabar gembira karena bisa mengembangkan potensi daerah sendiri serta menjadi peluang untuk lebih meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi yang ada. Peningkatan pertumbuhan ekonomi bukanlah hal yang mudah apalagi sebagai provinsi yang terbilang baru, yang tentu masih banyak tantangan yang harus dihadapi.

Sedangkan urgensi penelitiannya adalah untuk mendapatkan informasi melalui hasil riset tentang kondisi provinsi Sulawesi Barat pasca pemekaran wilayah mengenai apakah terjadi tingkat pertumbuhan ekonomi, bagaimana kondisi ketimpangan wilayahnya dan bagaimana tingkat kemiskinan yang ada, sehingga nantinya hasil riset ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya oleh pemerintah setempat.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif dan korelasional. Disebut penelitian deskriptif karena bermaksud menggambarkan kondisi dari variabel-variabel penelitian, dan disebut sebagai penelitian korelasional karena bermaksud menganalisis keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lain yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif karena menggunakan data sekunder berupa angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penyajian dari hasil penelitian juga berupa angka.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Mamuju tepatnya pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait. Data sekunder merupakan data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara kuantitatif.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menelusuri literatur seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan institusi daerah yang terkait.

Analisis pertumbuhan ekonomi

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi tingkat Kabupaten di Propinsi Sulawesi Barat, dapat digunakan analisis pertumbuhan ekonomi. Perhitungan pertumbuhan ekonomi tingkat Kabupaten ini dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang didasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Perhitungan pertumbuhan ekonomi masing-masing tahun dirumuskan sebagai berikut:

$$PE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}}$$

Dimana:

PE = Pertumbuhan Ekonomi

PDRB_t = PDRB tahun ke t

PDRB_{t-1} = PDRB tahun ke t-1

Analisis ketimpangan wilayah

Ketimpangan wilayah adalah ukuran ketidakmerataan pembangunan yang terjadi dalam sebuah wilayah, diukur dengan menggunakan perhitungan indeks Williamson. Indeks ketimpangan regional untuk menggambarkan ketimpangan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 \times \frac{f_i}{n}}}{\bar{y}}$$

V_w = Indeks Williamson

y_i = PDRB per kapita di kabupaten/kota i

\bar{y} = PDRB per kapita rata-rata di Provinsi Sulawesi Barat

f_i = Jumlah penduduk di kabupaten/kota i

n = Jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Barat

Indeks williamson besarnya antara nol dan satu. Semakin kecil angka yang dihasilkan menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil pula atau dapat dikatakan makin merata. Tetapi jika angka yang didapat mendekati satu maka ketimpangan semakin lebar.

Analisis tingkat kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi penduduk yang hidup kurang sejahtera. Dalam penelitian ini tingkat kemiskinan yang diukur dari persentase jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk yang ada pada di provinsi Sulawesi Barat dan kabupaten/kota dalam lingkup provinsi Sulawesi Barat, dalam satuan persen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis pertumbuhan ekonomi

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi tingkat Kabupaten di Propinsi Sulawesi Barat, dapat digunakan analisis pertumbuhan ekonomi. Perhitungan pertumbuhan ekonomi tingkat Kabupaten ini dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang didasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Tabel 1. Hasil perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2005-2020

Tahun	Tingkat pertumbuhan ekonomi (%)
2005	5,92
2006	6,99
2007	7,43
2008	8,54
2009	6,03
2010	11,91
2011	10,41
2012	9,25
2013	6,93
2014	8,86
2015	7,39
2016	6,03
2017	6,26
2018	5,68
2019	5,67
2020	-2,42

Berdasarkan hasil olah data yang ada maka pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan sebagaimana yang terdapat pada tabel 1 diatas, dimana dari tahun 2005-2020 pertumbuhan ekonomi mengalami Fluktuatif atau naik turun hal ini terlihat dari hasil olah data dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi diperoleh pada tahun 2010 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 11,91% sedangkan tingkat terendah berada pada tahun 2020 bahkan pada tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan karena mengalami pertumbuhan yang minus yakni -2,42. Hal ini terjadi karena seluruh sektor ekonomi yang ada mengalami goncangan yang kuat akibat dari adanya virus corona. Dari data yang ada maka dapat diberikan gambaran bahwa dampak dari virus corona ini sangatlah kuat mempengaruhi perekonomian sebab mampu memberikan dampak yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada. Secara umum pertumbuhan ekonomi yang ada di provinsi sulawesi barat cukup baik sebab pertumbuhannya selalu diatas angka 5 meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada juga mengalami kecenderungan berkurang setiap tahunnya meskipun dalam skala yang masih kecil.

Analisis ketimpangan wilayah

Ketimpangan wilayah adalah ukuran ketidakmerataan pembangunan yang terjadi dalam sebuah wilayah, diukur dengan menggunakan perhitungan indeks Williamson. Indeks ketimpangan regional untuk menggambarkan ketimpangan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat.

Salah satu alat untuk mengukur ketimpangan ekonomi di suatu wilayah adalah Indeks Williamson. Indeks ini menggunakan indikator PDRB dan jumlah penduduk pada suatu wilayah sebagai data dasar dalam perhitungannya. PDRB digunakan untuk mewakili indikator ekonomi. Sedangkan jumlah penduduk digunakan sebagai pembagi untuk mendapatkan PDRB per kapita. Ketimpangan termasuk kategori ringan apabila kurang dari 0,35, ketimpangan sedang antara 0,35 sampai dengan 0,5 dan ketimpangan tinggi apabila lebih dari 0,5.

Tabel 2. Hasil perhitungan indeks williamson dari tahun 2005-2020

Tahun	Indeks Williamson	Kategori
2005	0,161	Ringan
2006	0,160	Ringan
2007	0,146	Ringan
2008	0,165	Ringan
2009	0,152	Ringan
2010	0,285	Ringan
2011	0,306	Ringan
2012	0,309	Ringan
2013	0,366	Sedang
2014	0,378	Sedang
2015	0,377	Sedang
2016	0,362	Sedang
2017	0,360	Sedang
2018	0,351	Sedang
2019	0,340	Ringan
2020	0,336	Ringan

Berdasarkan hasil olah data dengan perhitungan indeks williamson seperti pada tabel 2 diatas maka dapat dijelaskan bahwa pasca pemekaran yang dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Barat yaitu tahun 2004 maka ketimpangan wilayah yang ada tidaklah begitu besar. Dari hasil yang ada dimana pada tahun 2005-2012 ketimpangan wilayah nilai indeksnya masih berada dibawah 0,35 dimana dengan nilai yang ada tersebut maka masih berada pada kategori **Ringan** yang menandakan bahwa kesenjangan pembangunan wilayah yang ada antar kabupaten atau wilayah masih dalam kondisi yang baik-baik saja. Hasil analisis selanjutnya yaitu dari tahun 2013-2018 didapatkan nilai indeks yang memiliki nilai antara 0,35 sampai dengan 0,5 sehingga masuk dalam kategori ketimpangan yang masih status **Sedang**, sedangkan pada tahun 2019-2020 diperoleh nilai indeks yang dibawah 0,35 sehingga ketimpangan ini turun lagi menjadi status **Ringan**. Jika melihat semua hasil analisis diatas pada tabel 2 maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat mampu menjaga kesenjangan wilayah yang ada didaerahnya sehingga tidak terdapat kesenjangan yang begitu tinggi. Sebagai daerah yang memisahkan diri atau berubah menjadi daerah otonom memang bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan namun menjadi otonomi daerah otonomi juga merupakan kesempatan untuk menjadi daerah yang mandiri sehingga harus mampu secara maksimal guna mengoptimalkan potensi yang ada sehingga dapat mengurangi ketimpangan-ketimpangan yang ada di daerah.

Analisis tingkat kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi penduduk yang hidup kurang sejahtera. Dalam penelitian ini tingkat kemiskinan yang diukur dari persentase jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk yang ada pada di provinsi Sulawesi Barat dan kabupaten/kota dalam lingkup provinsi Sulawesi Barat, dalam satuan persen.

Tabel 3. Hasil perhitungan tingkat kemiskinan tahun 2005-2020

Tahun	Tingkat kemiskinan (%)
2005	-
2006	19,03
2007	16,73
2008	15,29
2009	13,58
2010	13,89
2011	13,24
2012	12,3
2013	12,27
2014	12,4
2015	11,74
2016	11,3
2017	11,25

Tahun	Tingkat kemiskinan (%)
2018	11,02
2019	10,87
2020	20,74

Berdasarkan hasil olah data seperti pada tabel 3 diatas maka dapat dijelaskan bahwa secara umum tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2005-2020 cukup tinggi hal ini karena tingkat kemiskinan yang ada lebih dari 10% bahkan bisa sampai 20% lebih, dimana persentase terendah berada pada tahun 2016 dengan tingkat kemiskinan mencapai 11,3% dan tingkat tertinggi berada pada tahun 2020 karena mencapai tingkat kemiskinan sebesar 20,74% hal ini bisa saja diakibatkan dimana pada tahun 2020 terdapat penyebaran covid-19 yang mengakibatkan banyak sektor ekonomi yang mengalami dampak termasuk banyak perusahaan yang dengan terpaksa harus melakukan pemutusan hak kerja kepada para karyawan yang semakin banyak yang mengalami PHK maka akan berdampak pula tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil olah data yang ada maka pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan bahwa tahun 2005-2020 mengalami fluktuatif atau naik turun hal ini terlihat dari hasil olah data dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi diperoleh pada tahun 2010 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 11,91% sedangkan tingkat terendah berada pada tahun 2020 yakni -2,42. Dari hasil yang diperoleh dimana pada tahun 2005-2012 ketimpangan wilayah nilai indeks nya masih berada dibawah 0,35 dimana masih berada pada kategori **Ringan**, tahun 2013-2018 didapatkan nilai indeks antara 0,35 sampai dengan 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan yang masih **Sedang**, sedangkan pada tahun 2019-2020 diperoleh nilai indeks yang dibawah 0,35 sehingga ketimpangan ini turun lagi menjadi status **Ringan**. Secara umum tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2005-2020 cukup tinggi dimana persentase terendah berada pada tahun 2016 dengan tingkat kemiskinan mencapai 11,3% dan tingkat tertinggi berada pada tahun 2020 karena mencapai tingkat kemiskinan sebesar 20,74%.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 2014. Ekonomi pembangunan lanjutan. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Adisasmita, Rahardjo. (2014). Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Debrina Vita Ferezagia. 2018. Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Sosial Humaniora Terapan 1 (1) 1-6.
- Elisabeth Ivakdalam. 2011. Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Merauke. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Jhingan, M.L. 2010. Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kutscherauer, Alois, 2010. Regional Disparities In Regional Development of the Czech Republic. Ostrava: Universitas Teknik Ostrava.
- Lessmann, C. 2012. Regional inequality and decentralization : an empirical analysis. Environment and planning a, 44(6), 1363–1388.
- Muhammad Reza. 2019. Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Distribusi Pendapatan Wilayah di Provinsi Aceh. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia 6 (1). 17-32.
- Mankiw, N. Gregory., Quah, Euston., dan Wilson, Peter 2014. Pengantar Ekonomi Makro. Salemba Empat. Jakarta.
- Pritha Aprianoor dan Muhammad Muktiali. 2015. Kajian Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Jawa Barat. Jurnal Teknik PWK 4 (4) 484-498.
- Sianturi, Y.S. 2011. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan.

-
-
- Sirojuzilam. 2005. Beberapa Aspek Pembangunan Regional. Bandung: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
- Sjafrizal. 2012. Ekonomi wilayah dan perkotaan. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suhartono. 2015. Ketimpangan dan pembangunan ekonomi kabupaten/kota di daerah hasil pemekaran: Studi Kasus di Provinsi Banten dan Gorontalo. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik 6 (1) 33 – 43.
- Supriyatna, T. 1997. Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Todaro, Michael P., & Smith, S. C. 2015. Economic development (12th ed.). New York: Pearson Education Limited.